

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976. Teori ini menerangkan hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen) sebagai berikut: “*An agency relationship is one in which one or more persons (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*” (Jensen & Meckling, 1976). Dilihat dari pengertian yang disampaikan oleh Jensen dan Meckling dapat diketahui bahwa fokus dari agency theory adalah dua pihak individu yaitu prinsipal dan agen. Perspektif hubungan keagenan adalah dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pemilik atau investor yang diartikan sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yang disebut agen.

Agen mewakili manajemen adalah pihak yang diberikan kewenangan oleh prinsipal untuk mengambil keputusan. Agen harus mempertanggungjawabkan apa yang telah di amanahkan prinsipal, sedangkan prinsipal sebagai pihak pemberi amanah akan memberikan insentif kepada agen atas pencapaian yang telah diraih agen. Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi sifat manusia yaitu: manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self-interest*), manusia memiliki rasional terbatas mengenai persepsi masa datang (*bounded-rationality*), dan manusia selalu tak suka risiko (*risk-averse*). Dari penjelasan tersebut, asumsi yang mengatakan bahwa manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri menjadikan konflik kepentingan antara pemilik dan agen. Konflik tersebut mungkin terjadi karena mungkin agen tidak selalu berbuat selaras dengan kepentingan prinsipal. Manajemen melakukan upaya-upaya agar kinerja perusahaan terlihat baik sehingga, mereka menerima kepuasan dari pemilik berupa kompensasi keuangan. Namun dari sisi prinsipal, ia dirugikan akibat manajemen menutupi hal yang seharusnya dengan membuat kondisi perusahaan terlihat baik.

2.2 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan pengungkapan manajemen sebagai alat intervensi langsung manajemen dalam proses pelaporan keuangan melalui pengolahan pendapatan atau keuntungan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu bagi manajer maupun perusahaan yang dilanadasi oleh faktor ekonomi. Mengemukakan manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan untuk mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Manajer melakukan manajemen laba dengan memilih metode untuk menaikkan atau menurunkan laba. Manajer dapat menaikkan laba dengan cara menggeser laba periode-periode yang akan datang ke masa kini dan menurunkan laba dengan cara menggeser laba periode kini ke periode-periode berikutnya.

Manajemen laba didefinisikan sebagai usaha manajer untuk merekayasa laporan keuangan dengan sengaja dalam batasan yang dibolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang menyesatkan kepada para pengguna laporan keuangan untuk kepentingan para manajer (Soraya & Harto, 2014). Sedangkan Scott (2015) mengatakan bahwa manajemen laba sebagai tindakan manajer untuk melaporkan laba yang memaksimalkan keuntungan pribadi atau perusahaan dengan menggunakan kebijakan akuntansi. Dengan demikian, manajemen laba adalah upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan laba sesuai apa yang diinginkan manajemen untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya dalam batasan yang diperbolehkan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum.

Pada umumnya manajemen laba dilakukan dengan dua cara yaitu manipulasi akrual dan manipulasi aktivitas riil. Manajer menyukai Manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil disbanding manajemen laba melalui akrual Graham et al. (2004). Adanya pergeseran menurut Roychowdhury (2006), terdapat dua alasan. Pertama, manajemen laba melalui manipulasi akrual kemungkinan besar akan menarik perhatian auditor dan regulator dibanding dengan keputusan-keputusan riil, seperti penetapan harga dan produksi. Kedua, manajer yang hanya

mengandalkan pada manipulasi akrual akan berisiko jika realisasi akhir tahun defisit antara laba yang tidak dimanipulasi dengan target laba yang diinginkan melebihi jumlah yang dimungkinkan untuk memanipulasi akrual setelah akhir periode. Manipulasi aktivitas riil merupakan manipulasi melalui aktivitas perusahaan sehari-hari sepanjang periode akuntansi dengan tujuan untuk 8 memenuhi target laba atau untuk menghindari kerugian. Melakukan manipulasi melalui aktivitas riil merupakan jalan aman untuk mencapai target laba karena dapat dilakukan kapan saja sepanjang periode akuntansi berjalan. Target laba yang tercapai menunjukkan kinerja perusahaan yang baik walaupun berasal dari manipulasi dan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal tersebut dapat menurunkan nilai perusahaan dimasa mendatang.

2.2.1 Tujuan manajemen laba:

1. Memperbaiki citra perusahaan dimata pihak luar bahwa perusahaan tersebut memiliki resiko yang rendah
2. Memberikan informasi yang relevan dalam melakukan prediksi terhadap laba dimasa yang akan datang.
3. Meningkatkan kepuasan relasi bisnis.
4. Meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemampuan manajemen.

2.2.2 Pola Manajemen Laba :

Scott (2015) membagi manajemen laba yang mungkin dilakukan oleh para manajer perusahaan kedalam empat jenis pola manajemen laba yaitu:

A. Cuci Bersih (Taking a Bath)

Pola ini terjadi pada periode sulit, kondisi buruk yang tidak menguntungkan apapun pada saat terjadi reorganisasi, termasuk pengangkatan CEO baru. Manajer melakukan kerugian, mungkin dalam jumlah yang besar. Manajer berharap laba pada periode mendatang dapat meningkat karena berkurangnya beban periode mendatang.

B. Menurunkan Laba (Income Minimization)

Pola ini dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi dengan cara seperti pada pola taking a bath. Hal ini dilakukan pada saat profitabilitas tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis sekaligus sebagai upaya menyimpan laba sehingga jika laba periode mendatang mengalami penurunan drastis dapat diatasi dengan mengambil simpanan laba periode berjalan.

C. Menaikkan Laba (Income Maximization)

Pola ini dilakukan pada saat laba mengalami penurunan. Kebalikan dari income minimization, income maximization dilakukan dengan cara mengambil simpanan laba periode sebelumnya ataupun menarik laba periode yang akan datang, misalnya dengan menunda pembebanan biaya. Pola ini dilakukan atas dasar motivasi bonus, motivasi penghindaran pelanggaran perjanjian utang, pada penawaran saham perdana dan musiman, ataupun untuk menghindari turunnya harga saham secara drastis.

D. Perataan Laba (Income Smoothing)

Perataan laba dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

2.2.3 Motivasi Manajemen Laba :

Sulistiawan & Januarsi (2011) mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang memotivasi melakukan manajemen laba, yaitu:

1. Motivasi Bonus

Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai feedback atau evaluasi atas kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Insentif ini diberikan dalam jumlah relatif tetap dan rutin. Sementara bonus yang relatif lebih besar nilainya hanya akan diberikan ketika kinerja manajer berada di area pencapaian bonus yang telah

ditetapkan oleh pemegang saham. Kinerja manajemen salah satunya diukur dari pencapaian laba usaha. Pengukuran kinerja berdasarkan laba dan skema bonus tersebut memotivasi para manajer untuk memberikan performa terbaiknya sehingga tidak menutup peluang mereka melakukan tindakan manajemen laba agar dapat menampilkan kinerja yang baik demi mendapatkan bonus yang maksimal.

2. Motivasi Utang

Selain melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham, untuk kepentingan ekspansi perusahaan, manajer seringkali melakukan beberapa kontrak bisnis dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah kreditor. Agar kreditor mampu menginvestasikan dana di perusahaannya, tentunya manajer harus menunjukkan performa yang baik dari perusahaannya. Selain itu, untuk memperoleh hasil maksimal yaitu pinjaman dengan jumlah yang besar manajer mengelola laba untuk menampilkan performa yang baik.

Model pendeteksi manajemen laba Secara umum ada tiga cara yang telah dihasilkan para peneliti untuk

mendeteksi manajemen laba yaitu:

1. Model Berbasis Aggregate Accrual

Model berbasis aggregate accrual yaitu model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa dengan menggunakan discretionary accruals sebagai proksi manajemen laba. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Healy (1985), DeAngelo (1986), dan Jones (1991). Selanjutnya Dechow et al. (1995) mengembangkan model Jones menjadi model Jones yang dimodifikasi (modified Jones model). Model-model ini menggunakan total akrual dan model regresi untuk menghitung akrual yang diharapkan (expected accruals) dan akrual yang tidak diharapkan (unexpected accruals) (Sulistiyanto, 2008).

a) Model Healy (1985)

Model Healy (1985) merupakan model yang relatif sederhana karena menggunakan total akrual (total accruals) sebagai proksi manajemen laba. Alasan penggunaan total akrual adalah sebagai berikut:

- Total akrual memiliki potensi untuk mengungkap cara-cara manajemen laba baik itu menaikkan maupun menurunkan laba.
- Total akrual mencerminkan keputusan manajemen, yaitu untuk menghapus aset, pengakuan atau penundaan pendapatan dan menganggap biaya atau modal suatu pengeluaran.

Model Healy (1985)

$$TA_{it} = (\Delta CA_{it} - \Delta CL_{it} - \Delta Cash_{it} - \Delta STD_{it} - Dep_{it}) / (A_{it-1})$$

Keterangan :

TA_{it} : Total akrual perusahaan i pada periode t

ΔCA_{it} : Perubahan dalam aktiva lancar perusahaan i pada periode ke t

ΔCL_{it} : Perubahan dalam hutang lancar perusahaan i pada periode ke t

ΔCash_{it} : Perubahan dalam kas dan ekuivalen kas perusahaan i pada periode ke t

ΔSTD_{it} : Perubahan dalam hutang jangka panjang yang termasuk dalam hutang lancar perusahaan i pada periode ke t

Dep_{it} : Biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan i pada periode ke t

A_{it-1} : Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1

B) Model DeAngelo (1986)

DeAngelo (1986) mengasumsikan bahwa tingkat akrual yang nondiscretionary mengikuti pola random walk. Dengan demikian tingkat akrual yang

nondiscretionary perusahaan i pada periode t diasumsikan sama dengan tingkat akrual yang nondiscretionary pada periode ke $t-1$. Jadi, selisih total akrual antara periode t dan $t-1$ merupakan tingkat akrual discretionary. Dalam model ini, De Angelo menggunakan total akrual $t-1$ sebagai akrual nondiscretionary.

Model DeAngelo (1986):

$$DA_{it} = (TA_{it} - TA_{it-1}) / A_{it-1}$$

Keterangan :

DA_{it} : Discretionary accruals perusahaan i pada periode ke t

TA_{it} : Total accruals perusahaan i pada periode ke t

TA_{it-1} : Total accruals perusahaan i pada periode ke $t-1$

A_{it-1} : Total aktiva perusahaan i pada periode ke $t-1$

C) Model Jones (1991)

Dalam penelitian Jones menggunakan dasar model Healy (1985). Jones mengembangkan model untuk memisahkan discretionary accruals dari nondiscretionary accruals. Nilai dari discretionary accruals dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DA_{it} = TA_{it} / A_{it-1} - [\alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_{it} / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it} / A_{it-1})] + \varepsilon$$

Keterangan:

DA_{it} : Discretionary accruals perusahaan i pada periode t

TA_{it} : Total accruals perusahaan i pada periode t

A_{it-1} : Total aktiva perusahaan i pada periode ke $t-1$

ΔREV_{it} : Perubahan revenue perusahaan i pada periode ke t

PPE_{it} : Aktiva tetap perusahaan i pada periode ke t

ε : Error term

D) Model Friedlan (1994)

Model Friedlan merupakan pengembangan model Healy (1985) dan model DeAngelo (1986). Perhitungan discretionary accruals menurut model Friedlan adalah sebagai berikut:

$$DAC_{pt} = (TAC_{pt} / SALE_{pt}) - (TAC_{pd} / SALE_{pd})$$

Keterangan :

DAC_{pt} : Discretionary accruals pada periode tes

TAC_{pt} : Total accruals pada periode tes

TAC_{pd} : Total accruals pada periode dasar

$SALE_{pt}$: Penjualan pada periode tes

$SALE_{pd}$: Penjualan pada periode dasar

E) Model Modifikasi Jones

Dechow et al. (1995) menguji berbagai alternatif model akrual dan mereka menyatakan bahwa model modifikasi Jones adalah model yang paling baik untuk menguji manajemen laba. Model modifikasi Jones adalah sebagai berikut:

$$DA_{it} = TA_{it} / A_{it-1} - [\alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it} / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it} / A_{it-1})] + \varepsilon$$

Keterangan :

ΔREC_{it} : Perubahan piutang dagang perusahaan i pada periode t

2. Model Berbasis Specific Accruals

Model yang berbasis akrual khusus (specific accruals), yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu, misalnya piutang tak tertagih dari sektor industri tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industri asuransi (Sulistyanto, 2008).

3. Model Berbasis Distribution of Earnings After Management Model distribution of earning dikembangkan oleh Burgtähler dan Dichev, DeGeorge, Patel, dan Zeckhauser, serta Myers dan Skinner. Pendekatan ini dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba. ketidakberlanjutan kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat . (Sulistyanto, 2008)

2.3 Leverage

Leverage adalah hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai asetnya dalam rangka menjalankan aktivitas operasionalnya (Gunawan et al., 2015). Penelitian ini menggunakan rasio DER didalam mengidentifikasi manajemen laba untuk menganalisis rasio leverage. Jika suatu perusahaan mengalami ke bangkrutan maka modal yang pertama kali digunakan untuk melunasi segala hutang perusahaan, jadi semakin banyak modal perusahaan akan semakin baik di mata investor. Sebaliknya, apabila hutang perusahaan lebih banyak maka akan terlihat jelek dimata investor, untuk menghindari hal ini penggunaan hutang akan dilakukan dalam manajemen laba bagi perusahaan yang memiliki banyak hutang.

Menurut Kasmir (2018), dalam praktiknya apabila dari hasil perhitungan perusahaan yang memiliki rasio leverage yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya resiko kerugian yang lebih besar. Dampak ini akan mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (return saham) dengan diikuti oleh turunnya minat investor terhadap saham tersebut yang membuat harga saham tersebut akan turun.

Menurut Kasmir (2018), berikut beberapa tujuan perusahaan yang menggunakan rasio leverage :

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak kreditor
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.

4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur seberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai seberapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh oleh rasio leverage adalah :

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada kreditor.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur seberapa bagian dari setiap modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih.

Dalam manajemen keuangan perusahaan pada umumnya dikenal tiga macam leverage (Syamsuddin, 1987), yaitu:

1. Operating Leverage

Operating leverage didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan di dalam menggunakan fixed operating cost untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap earning before interest and taxes (EBIT). Operating leverage terjadi pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang menimbulkan biaya atau beban tetap. Apabila perusahaan tidak mempunyai biaya yang tetap, dengan kata lain semuanya variabel, maka perusahaan akan berada dalam posisi

yang relatif sangat baik. Hal ini disebabkan karena kalau perusahaan terpaksa mengurangi kegiatannya, biayanya juga akan berkurang secara proporsional juga. Selama harga jual masih lebih tinggi daripada variabelnya, perusahaan tersebut akan memperoleh laba. Tetapi kalau perusahaan menanggung biaya tetap, maka akan ada batas minimal perusahaan harus berproduksi (dan menjual) agar tidak menderita rugi. Batas minimal ini disebut sebagai titik break-even-nya. Dalam analisa operating leverage, pengertian laba yang dipergunakan adalah laba sebelum bunga dan pajak. Semakin besar biaya tetap suatu perusahaan, apabila proporsi biaya variabel dan harga jual adalah konstan, maka perusahaan tersebut akan mempunyai titik break-even yang semakin tinggi. Perusahaan semacam ini sering dikatakan sebagai perusahaan yang mempunyai risiko usaha yang tinggi, karena mudah atau peka terhadap perubahan unit yang terjual. Dengan kata lain, jika persentase perubahan unit 25 yang terjual sama, maka persentase perubahan laba sebelum bunga dan pajak akan semakin besar.

2. Financial Leverage

Financial leverage dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan kewajiban-kewajiban finansial yang sifatnya tetap untuk, memperbesar pengaruh perubahan EBIT terhadap pendapatan per lembar saham biasa (earning per share). Financial leverage timbul karena adanya kewajiban-kewajiban finansial yang sifatnya tetap (fixed financial charges) yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kewajiban-kewajiban finansial yang tetap ini tidaklah berubah dengan adanya perubahan tingkat EBIT dan harus dibayar tanpa melihat sebesar apapun tingkat EBIT yang dicapai oleh perusahaan.

3. Total Leverage

Total leverage dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan biaya tetap, baik biaya-biaya tetap operasi maupun biaya-biaya tetap finansial untuk memperbesar pengaruh perubahan volume penjualan terhadap pendapatan per lembar saham biasa (EPS). Oleh karena itu, total leverage dapat dipandang sebagai refleksi tetap keseluruhan pengaruh dari struktur biaya-biaya

tetap operasi dan biaya tetap finansial perusahaan. Rasio leverage dihitung menggunakan indikator Debt Equity Ratio (DER). Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Oktovianti & Agustia (2012) yang menyatakan bahwa leverage perusahaan berpengaruh terhadap praktek manajemen dalam melakukan manajemen laba. Perusahaan yang mempunyai rasio leverage yang tinggi, berarti proporsi hutangnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi aktivasinya akan cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba sehingga perusahaan yang memiliki leverage tinggi cenderung mengatur laba yang dilaporkan dengan menaikkan atau menurunkan laba periode masa datang ke periode saat ini.

Dengan memperbesar tingkat leverage berarti tingkat ketidakpastian (uncertainty) dari return yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula, tetapi pada saat yang sama hal tersebut juga akan memperbesar jumlah return yang akan diperoleh. Tingkat leverage ini bisa saja berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya, atau dari satu periode ke periode lainnya di dalam satu perusahaan, tetapi yang jelas, semakin tinggi tingkat leverage akan semakin tinggi risiko yang dihadapi serta semakin besar tingkat return atau penghasilan yang diharapkan

2.4 Audit Fee

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mendefinisikan imbalan jasa adalah biaya yang didapat oleh Akuntan Publik dari pihak yang memperoleh layanan terkait jasa audit yang diberikan (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2016). Menurut pendapat (Mohammed, Joshua and Ahmed, 2018), dalam memberikan layanan penting, auditor eksternal berhak atas biaya tertentu yang dibebankan kepada klien (auditee) sebagai remunerasi untuk upaya audit, biaya ini disebut "audit fees". Biaya audit bisa dijelaskan sebagai jumlah yang dibebankan pada klien dan diberikan pada auditor atas setiap hasil bekerja yang dilaksanakan untuk menyatakan opini atau posisi perusahaan klien yang sebenarnya (Abdul-Rahman, Benjamin and Olayinka,

2017). Sehingga biaya audit adalah kompensasi dari klien kepada auditor untuk jasa audit yang dilaksanakan.

Menurut Meidawati & Assidiqi (2019), besarnya biaya audit bergantung pada beberapa aspek, ialah:

1. Ciri keuangan, semacam tingkatan pendapatan, keuntungan aset, modal, serta lainnya;
2. Lingkungan, semacam persaingan, pasar staf profesional, serta lainnya;
3. Ciri operasi, termasuk tipe industri, banyaknya posisi industri, banyaknya lini produk, serta lainnya;
4. Aktivitas auditor eksternal, termasuk yang pernah dijalani, tingkatan koordinasi dengan auditor internal, serta lain – lain.

Menurut aturan etika kompartemen akuntan publik, audit fee didefinisikan sebagai jumlah biaya yang berbeda-beda bergantung pada tingkat keahlian yang dimiliki, penugasan risiko, struktur biaya terkait firma Certified Public Accountant (CPA) yang dimiliki seorang auditor, dan dengan pertimbangan profesional. Biaya audit atau Audit fee wajib dikeluarkan oleh perusahaan kepada auditor eksternal karena telah menggunakan jasa profesionalnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Panduan penentuan besarnya fee audit dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melalui SK No. KEP.024/IAPI/IAPI/VII/2008. Dalam surat keterangan tersebut disampaikan beberapa tahapan yang harus diperhatikan oleh akuntan publik dalam menetapkan imbal jasa (fee) audit diantaranya sebagai berikut :

1. Kebutuhan klien;
2. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (statutory duties);
3. Independensi;
4. Tingkat keahlian (levels of expertise) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan;
5. Basis penetapan fee yang disepakati.

Dengan adanya ketentuan ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada para klien bahwa audit fee yang diterima mencerminkan risiko dan tanggung jawab dari akuntan publik.

Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan menegaskan bahwa anggota harus memperhatikan prinsip dasar yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan imbalan jasa audit. Prinsip dasar tersebut terdiri dari :

1. Kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan,
2. Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit,
3. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (statutory duties),
4. Tingkat keahlian (level of expertise) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan,
5. Tingkat kompleksitas pekerjaan,
6. Jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan,
7. Sistem pengendalian mutu kantor, dan
8. Basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.

Banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan oleh akuntan publik dalam menetapkan imbalan jasa audit menjadikan besaran yang diterima oleh akuntan publik bervariasi. Indikasi hal tersebut karena setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda. Sedangkan nilai akhir dari audit fee yang dibayarkan oleh perusahaan adalah hasil dari negosiasi antara perusahaan dengan pihak kantor akuntan publik terkait.

Pengukuran audit fee dalam penelitian Immanuel & Yuyetta (2014) menggunakan logaritma natural atas professional fees untuk mewakili audit fee karena belum banyaknya perusahaan yang benar-benar mengungkapkan besaran audit fee atas laporan keuangan dalam annual report. Menurut Herawaty (2011) dalam Immanuel & Yuyetta (2014) penggunaan pengukuran professional fees karena penggunaan

jasa lain juga mempengaruhi audit fee. Sehingga professional fees dapat mewakili audit fee karena di dalamnya terdapat jasa audit.

Terdapat beberapa indikator terhadap audit fee yaitu sebagai berikut :

1. Risiko audit
Besarnya kecilnya fee audit yang diterima oleh auditor dipengaruhi oleh risiko audit dari kliennya.
2. Kompleksitas jasa yang diberikan
Fee audit yang akan diterima auditor, disesuaikan dengan tinggi rendahnya kompleksitas tugas yang akan dikerjakannya. Semakin tinggi tingkat kompleksitasnya maka akan semakin tinggi fee audit yang akan diterima oleh auditor.
3. Tingkat keahlian auditor dalam industri klien
4. Auditor yang memiliki tingkat keahlian yang semakin tinggi akan lebih mudah untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan pada laporan keuangan kliennya.
5. Struktur biaya KAP
Auditor mendapatkan fee-nya disesuaikan dengan struktur biaya pada masing-masing KAP. Hal ini dikarenakan untuk menjaga auditor agar tidak terjadi perang tarif.

2.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi, baik institusi pemerintah maupun institusi swasta (Oktovianti & Agustia, 2012). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional membantu untuk memonitor dan mengawasi manajemen yang lebih optimal. Kepemilikan institusional dengan kepemilikan saham yang besar memiliki intensif untuk pengambilan keputusan perusahaan. Banyaknya kepemilikan institusional di suatu

perusahaan, akan menjadikan manajer lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan (Nugroho, 2018).

Tarjo dalam Sandy & Lukviarman (2015) mengemukakan kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional dapat dikatakan sebagai pihak luar yang memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan berbeda yang berguna mencegah terjadinya konflik antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan sendiri. Adanya kepemilikan institusional dianggap dapat meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh manajer secara efektif. Jensen dan Meckling dalam Permanasari (2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Istilah kepemilikan institusional merujuk kepada proporsi saham yang dimiliki institusi (Suparlan, 2019). Institusi yang dimaksud bisa berupa lembaga atau perusahaan, baik yang dimiliki pemerintah atau swasta, domestik maupun asing. Institusi yang memiliki saham perusahaan biasanya merupakan blockholder, yaitu pemilik saham dalam jumlah besar (Murwaningsari, 2012). Menurut Pedersen et al. (2001), pemilik saham tergolong sebagai blockholder apabila pemilik saham tersebut memiliki lebih dari 5% saham suatu perusahaan atau pemilik saham tersebut adalah karyawan, direksi, bank, perusahaan lain, atau dimiliki seseorang sebagai jaminan pensiun. Berdasarkan penjelasan tersebut, institusi lain yang memiliki saham lebih dari 5% termasuk sebagai blockholder. Untuk mempermudah penyebutan, institusi yang memiliki saham suatu perusahaan akan disebut sebagai pemilik institusi.

Sebagai blockholder, pemilik institusi memiliki keunggulan dibandingkan jenis investor atau pemilik lain, seperti komisi broker yang lebih rendah. Ketika memerdagangkan saham dan voting power yang lebih besar (Din et al., 2021; Pedersen et al., 2001). Di samping itu, perubahan kepemilikan institusional juga direspon sebagai sinyal oleh investor lain. Ketika pemilik institusi melepas saham atas suatu perusahaan, harga perusahaan tersebut akan turun. Menurut Marsinah (2021), hal tersebut bisa terjadi akibat dua hal. Pertama, pemilik institusi memiliki sumber daya keahlian, dan waktu untuk menganalisis dan menguji keandalan informasi yang diberikan manajemen. Hal ini menyebabkan investor lain menganggap bahwa penurunan kepemilikan institusional disebabkan oleh buruknya prospek perusahaan. Kedua, pemilik institusi memiliki saham perusahaan dalam jumlah besar. Penjualan saham secara besar-besaran menyebabkan penurunan harga secara signifikan.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional, sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistik manajer. Kepemilikan Institusional yang tinggi akan mendorong perusahaan dalam kegiatan tanggungjawab sosialnya melalui pengungkapan sustainability report secara luas dan transparan agar tidak terjadi asimetri informasi antara agen dan principal. Tingginya kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat menyebabkan dorongan dan kekuatan suara dari pihak institusi semakin besar untuk mengawasi manajemen dalam mengoptimalkan perusahaan (Rahmawati & Handayani, 2017).

Keberadaan kepemilikan institusional dapat menunjukkan mekanisme corporate governance yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham. Berikut adalah kelebihan-kelebihan kepemilikan institusional (Permanasari, 2010):

1. Memiliki sumber daya yang lebih daripada investor individual untuk mendapatkan informasi.
2. Memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi.
3. Secara umum memiliki relasi bisnis yang lebih kuat dengan manajemen.
4. Memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.
5. Lebih aktif dalam melakukan jual beli saham sehingga dapat meningkatkan jumlah informasi secara cepat yang tercermin di tingkat harga

Dalam penelitian Annisa & Kurniasih (2012) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran yang penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemilik, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Keberadaan investor institusional juga mengindikasikan adanya tekanan dari pihak investor kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan penghindaran pajak dalam rangka memperoleh laba yang maksimal untuk investor institusional (Dewi & Jati, 2014).

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, selain mengacu pada teori-teori yang didapatkan dari berbagai literature, peneliti juga menggunakan penelitian-penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai dasar penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba.

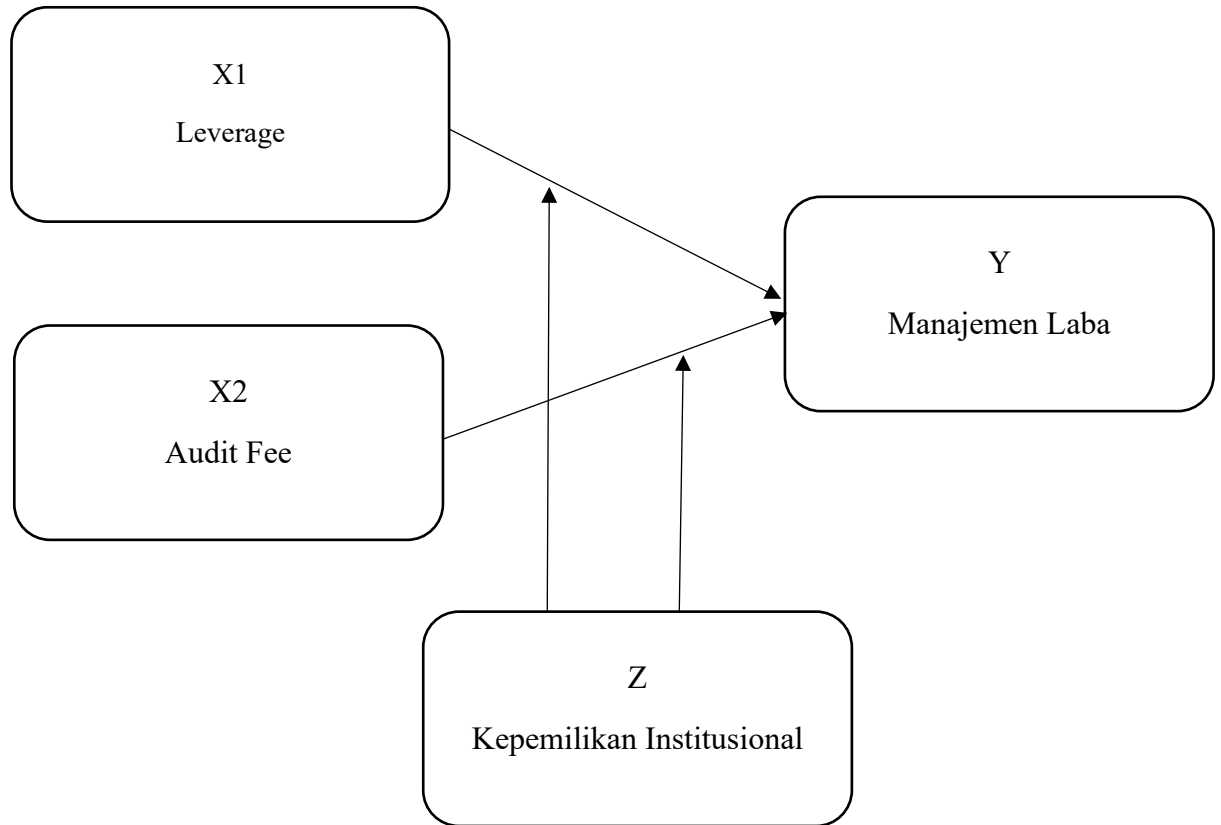
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Jessy Vinika Agustin dan Ni Nyoman Alit Triani (2023)	Pengaruh Audit Firm Size, Audit Fee, Audit Tenure Dan Kompetensi Auditor Terhadap Manajemen Laba.	Variable Dependen : Manajemen Laba Variable Independen: Audit Firm Size, Audit Fee, Audit Tenure Dan Kompetensi Auditor	Variabel audit firm size, audit tenure, kompetensi auditor berdampak bagi manajemen laba. audit fee tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
2.	Dinie Setyawati, Poppy Sofia Koeswayo dan Evita Puspitasari (2023)	Pengaruh Audit Fee Terhadap Integritas Laporan Keuangan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi	Variabel Independen : Audit Fee Variabel Dependen : Integritas Laporan Keuangan Variable Moderasi : Kepemilikan Institusional	Audit fee berpengaruh signifikan terhadap Integritas laporan keuangan. Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh dari audit fee terhadap integritas laporan keuangan
3.	Lisniat Daeli dan Hasnawati (2023)	Pengaruh Komite Audit, Fee Audit, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan	Variable Dependen : Manajemen Laba Variable Independen:	komite audit, fee audit, dan ukuran perusahaan menaruh pengaruh

		Perusahaan Terhadap Manajemen Laba	Komite Audit, Fee Audit, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Perusahaan	kepada manajemen laba. Pertumbuhan perusahaan pengaruh kepada manajemen laba.
4.	Mohammad Al Muthadin dan Hasnawati (2022)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba	Variable Dependend : Manajemen Laba Variable Independen: Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas Dan Leverage	Leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajemen dan profitabilitas belum terbukti meningkatkan pengaruh atas manajemen laba.
5.	Fiana Umi Kulsum (2022)	Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi	Variable Dependend : Manajemen Laba Variable Independen: Leverage Variabel Pemoderasi: Kepemilikan Institusional	Leverage berpengaruh dan Kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh dari leverage terhadap manajemen laba.
6.	Nimas Arum Sari dan Yeye Susilowati (2020)	Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilas,	Variable Dependend : Manajemen Laba Variable Independen:	Leverage dan komite audit yang memiliki pengaruh

		Kualitas Audit, Dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba	Leverage, ukuran perusahaan, Profitabilitas, kualitas audit, dan komite audit	terhadap manajemen laba Ukuran perusahaan, profitabilitas dan kualitas audit tidak berpengaruh pada manajemen laba.
7.	Dilla Febria (2020)	Pengaruh Leverage, Profitabilitas Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba	Variable Dependen : Manajemen Laba Variable Independen: Leverage, Profitabilitas Dan Kepemilikan	leverage dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh. profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba.
8.	Jusman Oscar dan Senny Harindahyani, (2019)	Pengaruh Fee Audit Dan Ukuran KAP Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Variable Dependen : Manajemen Laba Variable Independen: Fee Audit Dan Ukuran KAP	fee audit berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap manajemen laba

2.7 Kerangka Penelitian



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.8 Bangunan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2016). Penelitian ini akan meneliti pengaruh leverage dan audit fee terhadap manajemen laba dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi.

Pengaruh Leverage terhadap manajemen laba

Leverage merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menentukan aset atau dananya (sumber pendanaan) bersama dengan biaya tetap (kewajiban atau modal khusus) untuk meningkatkan potensi pengembalian bagi pemegang sahamnya (Sartono, 2015). Semakin tinggi leverage, semakin tinggi risiko melunasi hutang

perusahaan. Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki jumlah hutang yang besar terhadap total aset dan sering memanipulasi manajemen laba (Arviana et al., 2020). Hubungan antara leverage dan manajemen pendapatan adalah bahwa leverage dapat mempengaruhi manajemen untuk melakukan manajemen pendapatan. Pasalnya, jika perusahaan memiliki segudang kewajiban, ada pertaruhan bahwa pemilik akan meminta keuntungan yang lebih tinggi agar perusahaan tidak bangkrut (Hasanah, 2022). Mengenai hubungan antara pengaruh dan hipotesis organisasi, dikatakan bahwa semakin tinggi pengaruh organisasi, semakin baik pertukaran kelimpahan dari bos pinjaman organisasi kepada investornya. Penelitian ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan (Sholichah & Kartika, 2022). Menurut Kulsum (2022) leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini karena perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap bagi perusahaan sehingga menimbulkan manajemen laba dalam pengelolaan hutang. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Leverage berpengaruh terhadap manajemen laba

Pengaruh Audit Fee terhadap manajemen laba

Manajer sebuah perusahaan akan menggunakan jasa auditor independen guna mengurangi biaya keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Saleem Salem Alzoubi (2016), peran auditor independen amat penting dalam rangka mengurangi perilaku oportunistik manajer, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meminimalisasi biaya keagenan. Elder et al. (2011) mengatakan bahwa imbalan atas jasa audit mencerminkan nilai wajar pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor. Auditor harus menghindari dari adanya keterikatan ekonomi pada pendapatan dari klien. Jumlah pendapatan yang diterima auditor pada setiap pekerjaan audit didasarkan pada hasil negoisasi. Dampak tidak langsung dari hal tersebut mempengaruhi kualitas audit. Menurut Choi et al. (2010) menyatakan dengan fee audit yang besar akan mendorong auditor setuju terhadap tekanan dari klien dan berisiko terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Menurut Pambudi (2013), apabila auditor hanya memberikan jasa kepada klien satu atau beberapa kali, mungkin kontribusi fee yang dibayarkan klien terhadap penghasilan total auditor tidak akan material. Namun, jika pemberian jasa tersebut dilakukan dalam jangka panjang, apalagi jika ukuran perusahaan klien besar, maka tidak mustahil auditor akan kehilangan potensi penghasilan yang cukup signifikan jika mereka tidak mampu mempertahankan klien tersebut. Saleem Salem Alzoubi (2016) menyatakan bahwa fee audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan Lin dan Hwang (2010), mengemukakan bahwa fee audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Menurut Setyawati et al. (2023) audit fee mempengaruhi secara signifikan pada manajemen laba dan besarnya biaya audit fee akan membuat manajemen laba menjadi rendah. Besarnya biaya audit yang dibayar mendapatkan tekanan dari klien. Biaya audit yang besar akan mendorong auditor untuk setuju terhadap dorongan dari klien termasuk adanya manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Hipotesis yang dapat dirumuskan :

H2 : Audit fee berpengaruh terhadap manajemen laba

Kepemilikan Institusional Sebagai Moderasi dalam Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham perusahaan oleh pihak luar perusahaan yang berbentuk institusi, yang diharapkan dapat mengurangi tindakan manajemen perusahaan yang menyimpang. Dengan tingginya kepemilikan institusional, para investor institusional akan mendapatkan kesempatan control perusahaan yang lebih sedikit dalam penelitian sebelumnya oleh Sudyanto dan Rice (2016) meneliti kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan leverage terhadap manajemen laba dan menemukan bahwa salah satu penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan adanya kepemilikan oleh pihak institusional.

Pihak institusional merupakan pihak yang berada di luar perusahaan yang bertugas dalam membantu pemilik mengontrol dan mengawasi tindakan manajer. Sehingga dengan semakin banyaknya pihak institusi yang terlibat di dalam perusahaan, dapat

membantu meminimalkan tindakan manajemen laba. Menurut Kulsum DER (leverage) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini karena jika hutang mengalami kenaikan maka manajemen laba mengalami penurunan akibat kebijakan hutang digunakan untuk menciptakan nilai bagi perusahaan.

Menurut Kulsum (2022) hubungan moderasi yakni leverage berinteraksi dengan kepemilikan institusional dan juga berhubungan positif dengan variabel manajemen laba, hal ini karena total aset yang dibiayai oleh hutang perusahaan tergolong cukup tinggi sehingga hal ini harus menekan sisi manajerial laba dalam memperhitungkan resiko hutang. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H3: Kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap manajemen laba

Kepemilikan Institusional Sebagai Moderasi dalam Pengaruh Audit Fee Terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan saham institusional dalam jumlah yang banyak akan mempengaruhi kegiatan monitoring pemegang saham atas aksi yang diambil oleh entitas termasuk dalam rangkaian tindakan pelaporan keuangan (Wedari, 2015). Investor institusional dianggap lebih berpengetahuan dan waspada daripada investor individu (Tee et al., 2017). Perusahaan dengan kepemilikan institusional lebih besar mempunyai kendali atas perusahaan (Putri, Hardi and Silfi, 2017). Kepemilikan saham yang banyak (lebih dari 5%) memberi tanda kecakapannya buat memantau manajemen (Ali, 2019).

Pemantauan oleh investor institusional termasuk pada permintaan upaya audit yang lebih tinggi dari auditor untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Tee et al., 2017). Menurut Setyawati et al. (2023) kepemilikan istitusional sebagai variabel moderasi signifikan memoderasi pengaruh dari audit fee pada manajemen laba. Hal itu disebabkan karena investor institusional bisa mendorong auditor untuk berusaha dengan benar-benar melakukan audit sesuai dengan tahap kegiatan untuk

menyelesaikan audit yang memadai buat memeriksa laporan keuangan. Sesuai pada dasar teori serta beberapa riset terdahulu, maka hipotesis riset ini yakni:

H4 : Kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh audit fee terhadap manajemen laba